

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

Bab ini akan menjelaskan dan mengargumentasi mengapa perlu ada pembatasan periodisasi anggota lembaga perwakilan rakyat. Gagasan pembatasan periodisasi anggota lembaga perwakilan rakyat muncul untuk menjamin hak asasi warga negara lain, untuk menghindari kesewenang-wenangan anggota lembaga perwakilan rakyat dan menciptakan lembaga perwakilan rakyat yang berkualitas, untuk mengoptimalkan fungsi partai politik, dan untuk menciptakan inovasi pemikiran di lembaga perwakilan rakyat.

#### **A. Pembatasan Periodisasi Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat Untuk Menjamin Hak Asasi Warga Negara**

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, termasuk untuk menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat. Hak ini tidak hanya dijamin oleh konstitusi, tetapi juga Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik. Konvenan ini tidak hanya menjamin hak-hak dan kebebasan karakter pribadi, namun juga melindungi hak-hak individual sebagai warga negara, sebagai peserta dalam urusan umum, sebagai pemilih, dan sebagai pelayan masyarakat. Pasal 25 Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan: Semua warga negara harus memiliki hak dan kesempatan, tanpa

adanya pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 2 dan tanpa adanya pembatasan yang tidak masuk akal:<sup>1</sup>

- a. Untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan pekerjaan umum secara langsung atau dengan bebas memilih perwakilan;
- b. Untuk memilih dan dipilih pada periode pemilihan umum di mana harus mendapat perlakuan universal dan seimbang dan harus diselenggarakan dalam pemilihan yang rahasia, menjamin kebebasan berekspresi dari keinginan si pemilih;
- c. Untuk memiliki kesempatan dalam term-term umum yang seimbang bagi pelayanan umum dalam negaranya.

Penulis memaknai klausul “harus mendapat perlakuan universal dan seimbang” dalam Pasal 25 huruf b Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik sebagai dasar untuk melakukan pembatasan periodisasi anggota lembaga perwakilan rakyat. Tidak adanya pembatasan periodisasi menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara orang yang baru mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat dengan calon petahana. Calon petahana memiliki akses dan fasilitas yang lebih memadai untuk melakukan sosialisasi dan kampanye. Hal ini tidak seperti halnya kepala daerah yang mencalonkan diri kembali, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya.<sup>2</sup> Sangat tidak mungkin jika seluruh anggota lembaga

---

<sup>1</sup> Karl Josef Partsch, “Kebebasan Beragama, Berekspresi dan Kebebasan Berpolitik”, dalam Ifdhal Kasim, ed., *Hak Sipil dan Politik*, ELSAM, Jakarta, 2001, h. 298-300.

<sup>2</sup> Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

perwakilan melakukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara saat masa kampanye, karena begitu banyaknya jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat. Hal yang paling mungkin untuk mewujudkan perlakuan yang universal dan seimbang antar calon legislatif adalah dengan melakukan pembatasan periodisasi.

Adanya dinasti politik dalam tubuh lembaga perwakilan rakyat juga menjadi persoalan yang tidak kalah pentingnya. Anggota DPR terpilih periode 2009-2014 cukup banyak yang berasal dari keluarga pejabat pemerintahan. Sebut saja Agus Gumiwang Kartasasmita dari Partai Golkar yang merupakan putra dari Ketua DPD periode 2004-2009, Ginandjar Kartasasmita atau Sukur Nababan dari partai PDIP yang merupakan putra dari Putra Nababan, anggota DPR periode 2004-2009.<sup>3</sup> Secara tidak langsung, posisi keluarga mereka sebagai petahana juga memberikan keuntungan tersendiri.

Pembatasan atau *limitation* berkaitan langsung dengan UUD 1945. *Limitation* dapat dilakukan setiap saat, kecenderungan bersifat permanen dan ditujukan kepada cara individu dalam menggunakan haknya. Pembatasan periodisasi anggota lembaga perwakilan rakyat, sejalan dengan pemikiran Nihal Jayawickrama yang mengatakan:

*A limitation clause is clearly an exception to the general rule. The general rule is the protection of the right; the exception is its restriction. The restriction – interpreted in the light of the general rule – may not be applied to completely suppress the right. (Sebuah klausul*

---

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898).

<sup>3</sup> M. Djadijono dan Efriza, *Wakil Rakyat Tidak Merakyat*, Alfabeta, Bandung, 2011, h. 16-17.

*pembatasan jelas merupakan pengecualian dari aturan umum. Aturan umum adalah perlindungan hak; pengecualian adalah pembatasannya. Pembatasan harus sesuai dengan hukum oleh karena itu harus di atur pelaksanaan pembatasannya).*

Kemudian Nihal Jayawickrama juga mengatakan bahwa:

*Restrictions on the exercise of protected rights must be 'provided by law', 'prescribed by law', or be 'in accordance with law' or 'in conformity with law'. In respect of the first three, the corresponding French expression is pr'évu par la loi, suggesting thereby that they have the same meaning. The expression 'imposed in conformity with the law' refers to legitimate administrative action such as an authorization procedure relating to time, manner and place, which may be necessary to ensure the peaceful nature of a meeting or procession. (Pembatasan pelaksanaan hak dilindungi dengan 'disediakan oleh hukum', 'ditentukan oleh hukum', atau menjadi 'sesuai dengan hukum' atau 'sesuai dengan hukum'. Sehubungan dengan itu, ungkapan Perancis yang sesuai adalah pr'evu par la loi yang menunjukkan bahwa mereka memiliki arti yang sama. Ungkapan 'sesuai dengan hukum' mengacu pada tindakan administratif yang sah seperti prosedur otorisasi yang berkaitan dengan waktu, cara dan tempat, yang mungkin diperlukan untuk memastikan sifat damai dari pertemuan atau prosesi).*

Hal ini berarti, dalam melakukan *limitation* harus di dasarkan pada hukum dan ada legitimasi yang diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan hal itu.

Negara sebagai institusi yang menjaga hidup manusia berkewajiban untuk melindungi hak semua warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sesuai dengan pernyataan Friedman yang

menyatakan esensi dari nilai hukum demokrasi modern merupakan landasan “demokrasi konstitusional” meliputi: asas kehendak rakyat dasar dari kekuasaan, dan *rule of law*, yang unsur-unsurnya terdiri atas, “supremasi hukum”, “persamaan di muka hukum”, dan perlindungan HAM.<sup>4</sup>

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.<sup>5</sup> Persamaan di muka hukum dan perlindungan HAM dalam hal ini hanya dapat diwujudkan dengan melakukan pembatasan periodisasi anggota lembaga perwakilan rakyat.

### **B. Pembatasan Periodisasi Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat Untuk Menghindari Kesewenang-Wenangan Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat Dan Menciptakan Lembaga Perwakilan Rakyat Yang Berkualitas**

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menentukan, wewenang badan dan/atau pejabat pemerintahan dibatasi oleh masa atau tenggang waktu, wilayah atau daerah berlakunya dan cakupan bidang atau materi. Sebagai anggota lembaga

---

<sup>4</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Loc. Cit.*

<sup>5</sup> Jimly Asshidiqie III, *Op. Cit.*, h. 128.

perwakilan rakyat, wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan cakupan bidang atau materi wewenang telah diuraikan secara jelas dalam UU MD3. Namun terkait dengan masa atau tenggang waktu wewenang, dalam UU MD3 hanya disebutkan masa jabatan anggota lembaga perwakilan rakyat adalah lima tahun. Tidak ada klausul yang menyatakan “dan sesudahnya anggota lembaga perwakilan rakyat bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama, untuk satu kali masa jabatan.” Hal ini berarti tidak ada pembatasan periodisasi anggota lembaga perwakilan rakyat. Penulis berpendapat, di samping adanya masa jabatan, harus juga dicantumkan batasan periodisasi seperti halnya jabatan-jabatan lain di pemerintahan. Tanpa adanya batasan periodisasi, maka batasan waktu atau masa tenggang wewenang belum disebutkan secara lengkap.

Selama ini, tidak pernah ada pembatasan periodisasi anggota lembaga perwakilan rakyat. Berbeda halnya dengan Presiden yang memiliki batasan periodisasi yang diatur dalam undang-undang. Hal ini dikarenakan pembentuk undang-undang menganggap sifat jabatan antara Presiden dengan anggota lembaga perwakilan rakyat yang berbeda. Presiden adalah jabatan tunggal yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, sehingga memang diperlukan adanya pembatasan untuk menghindari kesewenang-wenangan. Adapun anggota lembaga perwakilan rakyat adalah jabatan majemuk yang setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan kewenangannya dilakukan secara kolektif, sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi kesewenang-wenangan.

Argumentasi tersebut tidak sepenuhnya benar. Dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan: “*Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-*



*undang dengan persetujuan DPR.”* Dalam Penjelasan UUD 1945, memang dapat ditemukan adanya pengertian mengenai ‘persetujuan DPR’ dan mengenai fungsi legislatif Presiden ‘bersama-sama’ DPR. Kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan itu terhadap setiap RUU dapat saja ditafsirkan memberikan kedudukan yang lebih tinggi, lebih rendah atau setara kepada DPR dalam berhadapan dengan Pemerintah. Akan tetapi, dalam Penjelasan UUD 1945, kedudukan DPR itu dinyatakan kuat, tetapi Presiden tidak ‘*untergeordnet*’, tetapi ‘*neben*’ terhadap DPR. Oleh karena itu, pengertian ‘bersama-sama’ disitu berarti ‘kesetaraan’ dan ‘kesederajatan’. Dalam praktek, disetujui tidaknya suatu RUU oleh DPR, sesuai tata tertib DPR dilakukan melalui proses persidangan, bukan ditentukan begitu saja oleh pimpinan DPR. Dengan sendirinya yang dimaksud dengan istilah ‘bersama-sama’ di atas dilakukan dalam persidangan bersama-sama. Dalam proses persidangan itu, bisa terjadi beberapa kemungkinan. Pertama, berdasarkan mekanisme persidangan yang ada, suatu RUU diputus melalui pemungutan suara dengan mayoritas dukungan memenangkan skenario atau versi pemerintah. Kedua, putusan RUU itu justru diambil melalui pemungutan suara yang memenangkan versi partai oposisi.

Dalam hal terjadi kemungkinan kedua, sudah seyogyanya persetujuan bersama dalam persidangan itu dapat dianggap sebagai persetujuan yang bersifat institusional, meskipun suara yang menang adalah suara ‘oposisi’. Jika kita mencermati Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 yang menegaskan bahwa dalam 30 hari, Presiden tidak mengundang RUU yang sudah disetujui bersama, maka RUU tersebut berlaku sebagai UU. Dengan demikian, Presiden tidak

memiliki hak veto untuk menolak mengundangkan RUU yang sudah mendapat persetujuan DPR melalui proses pembahasan bersama dengan Pemerintah.<sup>6</sup>

Menurut saya, DPR memiliki kewenangan yang luas karena dapat membentuk suatu UU tanpa pengesahan dari Presiden sekalipun. Atau jika DPR menolak menyetujui RUU yang diajukan oleh Presiden, maka RUU tidak akan disahkan menjadi UU. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal pembentukan undang-undang, kedudukan DPR lebih kuat dibandingkan dengan Presiden.<sup>7</sup>

Ada istilah yang pernah dikatakan oleh Lord Acton yaitu, "*Power tends to corrupt, and absolute power tends to corrupts absolutely.*" Dapat dilihat bahwa banyak anggota lembaga perwakilan rakyat yang sudah menjabat beberapa periode namun tidak memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Justru muncul potensi penyalahgunaan wewenang ketika seseorang terlalu lama menjabat sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat.

Dudhie Makmun Murod, anggota DPR-RI daerah pemilihan Sumatera Selatan II yang menjadi terpidana dalam kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Ia merupakan anggota DPR-RI periode 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014. Pada tahap persiapan pemilu 2009, ia sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Ada pula Eri Zulfian yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi uang makan dan minum fiktif DPRD Kabupaten Padangpariaman 2010/2011<sup>8</sup>, ia menjadi anggota DPRD Padang Pariaman sejak 1999-2004, kemudian terpilih kembali

---

<sup>6</sup> Jimly Asshidiqie III, *Op. Cit.*, h. 182-184.

<sup>7</sup> Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, h. 214.

<sup>8</sup> <http://www.antarasumbar.com/berita/112670/pengamat-anggota-dprd-segera-diberhentikan-jika-divonis-bersalah.html> dikunjungi pada tanggal 8 Juni 2016 pukul 20.45.



untuk periode 2004-2009 dan 2009-2014. Atau Marthen Apuy yang terjerat kasus dugaan korupsi dana operasional DPRD Kutai Kartanegara tahun 2005 senilai Rp 2,67 miliar.<sup>9</sup> Marthen Apuy menjadi anggota DPRD Kutai Kartanegara periode 2004-2009, anggota DPRD Kalimantan Timur periode 2009-2014, dan anggota DPR RI periode 2014-2019. Masih banyak lagi nama-nama anggota lembaga perwakilan rakyat yang menjadi tersangka dan/atau terpidana kasus korupsi. Hal ini merupakan dampak buruk tidak adanya pembatasan periodisasi anggota lembaga perwakilan rakyat.

Tidak hanya anggota DPR dan DPRD yang memiliki potensi untuk menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, belum lama ini, ketua DPD Irman Gusman ditangkap oleh KPK atas dugaan suap terkait kuota gula impor. Meskipun DPD tidak memiliki fungsi anggaran, namun pada kenyataannya bisa pula terjerat kasus korupsi. Perlu diketahui, Irman Gusman telah menjadi anggota MPR mewakili Sumatera Barat sejak 1999. Kemudian menjadi anggota DPD sejak 2004 hingga sekarang. Bahkan saat ini merupakan periode kedua dirinya menjadi ketua DPD.<sup>10</sup> Menurut Uumbu Rauta, kasus suap yang menimpa Ketua DPD Irman Gusman membuktikan adagium bahwa kekuasaan memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan.<sup>11</sup> Hal ini semakin menegaskan bahwa perlu adanya pembatasan periodisasi anggota lembaga perwakilan rakyat karena kekuasaan yang terlalu lama cenderung disalahgunakan.

### **C. Pembatasan Periodisasi Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat Untuk Mengoptimalkan Fungsi Partai Politik**

<sup>9</sup> <http://www.jpnn.com/read/2014/09/15/257937/Inilah-Nama-48-Anggota-Dewan-Terpilih-yang-Terjerat-Korupsi-/page3> dikunjungi pada tanggal 8 Juni 2016 pukul 20.34.

<sup>10</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Irman\\_Gusman](https://id.wikipedia.org/wiki/Irman_Gusman) dikunjungi pada tanggal 19 September 2016 pukul 20.48.

<sup>11</sup> <http://www.beritasatu.com/nasional/36672-kasus-irman-gusman-buktikan-kekuasaan-cenderung-disalahgunakan.html> dikunjungi pada tanggal 19 September 2016 pukul 20.37.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, d dan e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), partai politik berfungsi sebagai sarana: a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Partai politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat. Czudnowski mendefinisikan rekrutmen politik sebagai suatu proses yang berhubungan dengan individu-individu atau kelompok individu yang dilantik dalam peran-peran politik aktif. *“The process through which individuals or groups of individuals are inducted into active political roles”*. Ia juga mengemukakan 6 hal yang dapat menentukan terpilih atau tidaknya seseorang dalam lembaga legislatif, salah satunya adalah *initial political activity* dimana faktor ini merujuk pada pengalaman politik seseorang.<sup>12</sup> Apabila tidak ada proses rekrutmen politik yang baik dan hanya mengandalkan kader yang itu-itu saja, maka hal ini menjadi preseden buruk bagi partai politik itu sendiri dan negara. Partai politik

---

<sup>12</sup> Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, h. 99-101.

tidak akan berkembang dan negara akan terkena imbasnya karena tidak ada kader-kader pemimpin yang inovatif dan berkualitas.

Selain merekrut, di dalam tubuh partai politik perlu dikembangkan sistem pendidikan dan kaderisasi kader-kader politiknya. Sistem kaderisasi ini sangat penting mengingat perlu adanya transfer pengetahuan (*knowledge*) politik, tidak hanya yang terkait dengan sejarah, misi, visi dan strategi partai politik, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan permasalahan bangsa dan negara. Dalam sistem kaderisasi juga dapat dilakukan transfer keterampilan dan keahlian berpolitik. Sistem kaderisasi perlu disertai dengan sistem transparan yang memberikan jaminan akses kepada semua kader yang memiliki potensi.<sup>13</sup>

Dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan rekrutmen politik, partai politik tidak hanya menjaring sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi kader partai politik, tetapi juga harus memberikan pendidikan politik agar meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Perlu diperhatikan pula salah satu tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.<sup>14</sup>

Partai politik juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang apa itu politik dan bagaimana menyuarakannya. Menunjukkan cara berpolitik yang sehat, berkompetisi yang baik dan menghormati peraturan yang telah disepakati bersama sangat diperlukan dalam edukasi politik. Hal ini tidak dapat

---

<sup>13</sup> Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Reformasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, h. 70-71.

<sup>14</sup> Pasal 10 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189).

dilakukan apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban politik, terutama dalam negara seperti Indonesia. Terlebih harus disadari bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih ‘tradisional’. Salah satu karakteristik masyarakat tradisional menurut Weber adalah pengkultusan terhadap seorang pemimpin. Pemimpin menjadi begitu kuat mempengaruhi opini publik. Dengan kekuatan pengaruh untuk dipatuhi pengikutnya, sebenarnya pemimpin yang baik akan dapat lebih mudah untuk mengedukasi masyarakat. Celakanya, kalau pemimpin justru memanfaatkan kondisi masyarakat ini dengan mengeksploitasi dan memanipulasi opini serta perilaku mereka guna tercapainya tujuan politiknya sendiri.<sup>15</sup>

#### **D. Pembatasan Periodisasi Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat Untuk Menciptakan Inovasi Pemikiran Di Lembaga Perwakilan Rakyat**

Dalam suatu lembaga perwakilan rakyat diperlukan orang-orang yang kreatif dan inovatif terkait dengan pelaksanaan fungsi dan wewenangnya. Hal ini tidak akan terjadi jika mayoritas anggota lembaga perwakilan rakyat adalah wajah lama. Dari data yang ada, sebanyak 242 orang dari 560 anggota DPR-RI periode 2014-2019 adalah petahana. Artinya, lebih dari 50% sudah pernah menjabat pada periode sebelumnya. Mereka akan cenderung berpikir statis dan enggan melakukan perubahan. Jika terus menerus dibiarkan, hal ini akan menghambat kemajuan bangsa.

Lembaga perwakilan rakyat membutuhkan anggota yang berpikir dinamis dan kritis agar dapat menciptakan inovasi pemikiran di lembaga perwakilan rakyat. Dinamis berarti giat bekerja, tidak tinggal diam, dan terus

---

<sup>15</sup> Firmanzah, *Op. Cit.* h. 75-77.

bertumbuh. Sedangkan kritis berarti tajam dalam menganalisa. Namun yang perlu diingat adalah mereka bekerja giat bukan hanya untuk dapat terpilih kembali menjadi wakil rakyat, tetapi untuk menyejahterakan rakyat. Hal tersebut hanya dapat diwujudkan jika ada pembatasan periodisasi anggota lembaga perwakilan rakyat. Tanpa adanya pembatasan periodisasi, para petahana akan enggan meninggalkan jabatan sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat karena kenyamanan dan fasilitas yang mereka dapatkan.

